

MODEL PENGEMBANGAN USAHA SERABUTAN BERBASIS SUMBER INFORMASI KEPUSTAKAAN DI DESA

Pawit M. Yusup

Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

Abstrak

Kemiskinan di pedesaan dipahami sebagai kondisi kelompok orang yang dikaitkan dengan aspek ekonomi dan non-ekonomi seperti aspek sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, psikologi, lingkungan, hukum, antropologi, aspek-aspek personal dari orang miskin sendiri, serta aspek kebutuhan dan jenis penghidupan mereka. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif jenis-jenis informasi penghidupan yang digunakan oleh orang-orang miskin di pedesaan yang umumnya bersifat serabut dan telah digunakan sebagai basis survivabilitas penghidupan mereka yang kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek utama kebutuhan dasar. Selanjutnya, hal itu dipetakan berdasarkan karakteristik masing-masing. Metode yang digunakan adalah pendampingan atau *participatory research appraisal* (PRA) sebagai usaha berbasis implementasi hasil membaca kepustakaan kewirausahaan yang disediakan oleh perpustakaan yang ada di desa. Hasil penelitian menggambarkan suatu model pengembangan usaha serabut yang dapat diterapkan untuk orang miskin di desa. Salah satu hasilnya adalah perumusan model pengembangan usaha serabut berbasis pemanfaatan sumber-sumber informasi kepustakaan yang ada di desa

Kata kunci : kemiskinan, pedesaan, kebutuhan dasar, mata pencaharian, mencari informasi.

Abstract

Rural poverty is known as a condition of a group of people associated with the economic and non-economic aspects such as social, cultural, health, education, psychology, environment, law, anthropology, as well as personal aspects of the poor themselves, including the needs and types of livelihood. This research attempted to comprehensively recognise the types of livelihoods information sought and used by poor people in rural areas, which are generally casual and has been used as their survivability base. It is then linked to the main aspects of their basic needs and mapped according to each characteristics. Method used was mentoring or *Participatory Research Appraisal* (PRA) as an implementation-based effort of the results of reading literature about enterpresneurship provided by libraries in villages. The research described a model for developing casual business that can be implemented for poor people in villages. One of the outputs was the formulation of casual business development model which was based on the usability of various literature information sources in villages.

Keywords : poverty, rural, basic need, livelihoods information seeking.

1. Pendahuluan

Secara keilmuan, kemiskinan di pedesaan dipahami sebagai suatu kondisi sosial sekelompok orang yang dikaitkan dengan aspek ekonomi dan aspek non-ekonomi, termasuk aspek sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, psikologi, lingkungan, hukum, antropologi, dan seni yang sering dikaitkan dengan kemiskinan ini (Rusastra, dkk., 2010). Kemiskinan tidak hanya dipandang secara parsial

atau hanya dilihat dari satu sisi kehidupan saja. Akan tetapi, harus dilihat secara kontekstual (Yusup, 2013). Kemiskinan, termasuk kemiskinan pedesaan, perlu dilihat dari beragam konteks, baik secara teoretik keilmuan, praktik kebijakan, maupun objektif-subjektif si miskin sendiri (Yusup, 2013a:86--89).

Penelitian ini akan mengambil bagian dari upaya memahami secara komprehensif jenis-jenis informasi penghidupan yang digunakan oleh orang-orang miskin pedesaan yang pada umumnya bersifat serabutan dan yang selama ini dijadikan dasar survivabilitasnya. Jenis-jenis informasi penghidupan yang dimaksud dikaitkan dengan aspek-aspek kebutuhan utama yang mendasarinya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jenis kebutuhan utama yang paling dominan dan variasi jenis informasi penghidupan yang dicari dan digunakan oleh mereka dikaji secara mendalam dan dipetakan berdasarkan karakteristik masing-masing.

Pendekatan penelitian dilakukan secara *emik* dan hasilnya diuji secara *etik* sehingga *outcome*-nya menjadi lebih lengkap dan teruji. Sementara itu, pendekatan aplikasinya adalah pendampingan pada kelompok usaha yang dilakukan orang miskin pedesaan berbasis layanan pustaka kewirausahaan yang difasilitasi oleh unsur perguruan tinggi, pemerintah setempat, layanan perpustakaan, dan kreatifitas layanan proaktif perpustakaan-perpustakaan yang ada di desa.

Dengan diketahuinya model seperti dikemukakan dalam paragraf di atas, hal ini bisa dijadikan informasi tambahan bagi strategi intervensi pembangunan oleh negara dalam rangka upaya mengurangi angka kemiskinan di pedesaan. Orang-orang miskin di pedesaan tidak lagi hanya dijadikan “objek” pembangunan dengan dalih pengentasan kemiskinan. Mereka adalah pelaku pembangunan atas mereka sendiri, memiliki jenis kebutuhan utama yang berbeda, dan memiliki variasi jenis penghidupan yang berbeda satu sama lain. Mereka adalah subjek-subjek pembangunan dan mereka mengalami sendiri proses pembangunan dimaksud.

2. Kajian Literatur

Penelitian Amirudin (2010) tentang “Makna Miskin bagi Penduduk Miskin di Jawa Tengah (Analisis Mitos Kemiskinan di Kotamadya Dati II Semarang)” menunjukkan bahwa hakikat makna miskin bagi si miskin pada intinya merupakan sebuah proses transisi, yaitu sebuah proses yang dibangun minimal oleh dua pasang dimensi oposisi yang mencakup dimensi penolakan (penolakan terhadap kondisi kemiskinan) dan dimensi penerimaan (penerimaan terhadap *cultural realm* yang dialami). Orang-orang miskin sering mengungkapkan

kata-kata “menerima” keadaan, tetapi pada hakikatnya mereka merasa tidak ingin menjadi miskin. Mereka sebenarnya menerima, tetapi sekaligus menolak keadaan yang sedang dialaminya.

Philips dan Legates (1981) dalam Badruddin (2009) menjelaskan empat pandangan tentang kemiskinan. Pertama adalah bahwa kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari si miskin yang cenderung menghambat untuk melakukan perbaikan nasibnya. Akibatnya, si miskin tidak melakukan rencana ke depan, menabung, dan mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kedua adalah bahwa kemiskinan dipandang sebagai akibat dari subkultur tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya. Ketiga adalah bahwa kemiskinan dipandang sebagai akibat kurangnya kesempatan dan selalu kekurangan dalam bidang keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan dalam masyarakat. Keempat adalah bahwa kemiskinan merupakan suatu ciri struktural dari kapitalisme bahwa dalam masyarakat kapitalis segelintir orang menjadi miskin karena yang lain menjadi kaya.

Savolainen (2012) dalam “*Conceptualizing Information Need in Context Information Research*” mengemukakan bahwa kebutuhan informasi pada setiap orang selalu memiliki konteksnya sendiri. Ia berubah seiring perubahan kondisi personal dan situasional dari orang yang bersangkutan.

Yusup (2012) dalam “Perilaku Pencarian Informasi Penghidupan pada Penduduk Miskin Pedesaan: Studi Fenomenologi Mengenai Makna Miskin bagi Penduduk Miskin dan Perilakunya dalam Mencari Informasi Penghidupan di Pedesaan Kabupaten Ciamis Jawa Barat” mengemukakan bahwa dunia kehidupan dan penghidupan orang-orang miskin pedesaan bersifat sangat terbatas. Dari aspek pencarian pekerjaan sebagai penopang kehidupannya

mereka berkulat di sekitar kerabat, tetangga, dan sesama pekerja sejenis. Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa yang unik dari penelitian ini adalah bahwa jenis informasi yang datangnya dari hubungan interpersonal lebih banyak dipilih oleh penduduk miskin pedesaan dalam mencari informasi penghidupannya.

Yusup, dkk. (2013) dalam “Dimensi Pencarian dan Penggunaan Informasi Kesehatan pada Keluarga Prasejahtera di Kabupaten Bandung” memetakan bahwa (1) orang miskin lebih suka mencari informasi kesehatan dengan cara aktif dan pasif dengan sumber dan saluran informasi interpersonal yang bersifat informal dan (2) yang paling menonjol adalah pada jenis informasi kesehatan yang dicari dan digunakannya lebih banyak bersumber pada ahli kesehatan terpilih dan juga dari tetangga dan keluarga. Mereka tidak ada yang menggunakan informasi yang bersumber dari media, baik cetak maupun elektronik.

Zhao, dkk. (2009) dalam “*Perceived Information Needs and Availability: Results of A Survey of Small Dairy Farmers in Inner Mongolia*” mengkaji berbagai bentuk penerimaan informasi atas dasar kebutuhan yang berbeda-beda dari para petani susu (pemerah susu) di Mongolia. Hasilnya menggambarkan bahwa bahwa informasi dari para petani dan sumber informasi dari pasar lebih banyak digunakan dibandingkan dengan informasi dari sumber-sumber teknologi. Sementara itu, para petani susu yang tingkat pendidikannya relatif lebih tinggi lebih banyak menggunakan informasi dan sumber-sumber informasi dari sumber-sumber teknologis.

Kepustakaan tersebut membahas tema penggunaan informasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk kemiskinan di pedesaan. Jika dikembangkan secara proposisional, semua kepustakaan tersebut menggambarkan pola proposisi, yaitu (1) lingkup penghidupan orang miskin lebih banyak bersifat serabutan, (2) lingkup komunikasi sosial yang dilakukan orang miskin pedesaan sangat terbatas, (3) orang miskin pedesaan lebih suka menggunakan saluran interpersonal dibanding saluran yang bersifat teknologis, (4) orang miskin pedesaan masih berkulat dengan kebutuhan dasar; dan (5) makna lain tentang kemiskinan yang belum dirumuskan.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau teknik *participatory research appraisal* (PRA). Secara umum konsep metode PRA pada dasarnya adalah kerangka konseptual, prinsip-prinsip, nilai ideologis, visi yang ingin dicapai, dan metode yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan pemikiran tentang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai metodologi, PRA merupakan kerangka kerja yang memiliki latar belakang teoretis yang menggunakan satu paradigma tertentu. Dalam tataran pelaksanaan, metode PRA merupakan alat-alat untuk mengembangkan proses-proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Konteks partisipasi dalam hal ini adalah keterlibatan para anggota masyarakat kelompok miskin di pedesaan dalam kegiatan membaca dan menggunakan fasilitas bahan bacaan lainnya yang disediakan oleh perpustakaan terdekat.

Terdapat beberapa jenis kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan program kegiatan yang menggunakan prinsip PRA, yaitu *participatory rural appraisal; participatory research and development; participatory rapid appraisal; participatory planning and assesment; participatory learning methods; participatory action research; participatory learning and action* (Kusnaka dan Harry Hikmat, 2003). Jenis PRA ini lebih bersifat teknik-teknik praktik di lapangan yang tampak dalam bentuk kegiatan yang ditekankannya. Misalnya, ada yang lebih mengutamakan praktik pendampingan, ada yang lebih menonjolkan aspek partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diprogramkan, dan ada yang lebih menonjolkan aspek teknik pengumpulan data untuk menyusun laporan penelitian untuk tujuan pengembangan. Selain untuk kajian penelitian, teknik PRA juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran, pendampingan, perencanaan, pengembangan, dan ke penerapan program kegiatan yang melibatkan masyarakat atau kelompok sasaran tertentu. (Handayani, 2009). Penelitian ini lebih banyak mengambil prinsip PRA dalam bentuk kegiatan pendampingan bertahap dalam rangka untuk membuat rintisan penyusunan model pengembangan usaha serabutan yang didasarkan pada pemanfaatan sumber-sumber informasi kepustakaan yang ada di desa.

Adapun langkah-langkah PRA yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan (i) pembelajaran bersama orang-orang miskin pedesaan mengenai jenis usaha dan penghidupan di desa yang sesuai dengan pilihan mereka,

(ii) penyadaran terhadap sejumlah orang miskin di desa mengenai potensi usaha yang bisa dilakukan di desa sesuai dengan jenis usaha pilihannya, (iii) kegiatan diskusi terencana dan terprogram dengan orang miskin di desa tentang mereka sendiri dan pengalaman-pengalaman kehidupan mereka selama ini, (iv) pengumpulan informasi dan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan mereka dalam berkehidupan, (v) pengembangan model visual mengenai teknik berusaha secara lebih baik pada sejumlah penduduk miskin di desa, (vi) penyediaan informasi dan sumber-sumber informasi yang sesuai dengan peminatan bidang usaha di pedesaan, (vii) pengembangan model-model usaha yang dilakukan oleh orang miskin di desa yang umumnya bersifat serabutan berdasarkan pola pendampingan atas mereka, dan (viii) pemantauan secara terus-menerus atas perkembangan model usaha yang dicoba dikembangkan oleh beberapa orang miskin di desa dengan cara melakukan diskusi secara berkala, dan memberikan pelatihan usaha secara berkala. Dengan pendekatan PRA, langkah-langkah teknis urutan kegiatan penelitian ini terpola, yaitu (i) menyusun model intervensi pembangunan yang berorientasi pada pengentasan orang-orang miskin pedesaan, (ii) menyusun model intervensi program pengentasan kemiskinan pedesaan berbasis pelibatan orang-orang miskin pedesaan, dan (iii) mengaplikasikan dengan cara mengembangkan salah satu atau beberapa model usaha orang-orang miskin pedesaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tulisan

ini lebih fokus pada penyusunan model pengembangan usaha serabutan yang biasa dilakukan oleh orang miskin pedesaan atas dasar pemanfaatan perpustakaan tentang kewirausahaan, secara terdampangi.

4. Jenis-jenis Usaha Serabutan di Desa

Cabang-cabang usaha yang ada di desa khususnya lokasi penelitian, yakni di pedesaan kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat bagian Selatan diuraikan lebih lanjut. Pada penelitian tahun 2013 sudah ditemukan tidak kurang dari 52 jenis pekerjaan yang secara aktif dilakukan oleh kelompok penduduk miskin di pedesaan (Yusup, 2013; Rachmawati, Tine dan Subekti, 2013). Pada tahun 2014, jumlah jenis usaha yang dilakukan oleh penduduk miskin di pedesaan terutama di lokasi penelitian sudah bertambah lagi, yakni 58 jenis. Jenis pekerjaan dimaksud secara umum bersifat serabutan. Mereka bisa hidup bersama anggota keluarganya hanya dengan mengandalkan pekerjaan-pekerjaan seperti itu.

Dilihat dari aspek kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya sehari-hari, pada umumnya mereka mengaku “dicukup-cukupkan saja” (Yusup, 2012). Pernyataan dicukup-cukupkan saja sebenarnya mengandung arti tidak cukup sesuai dengan standar kehidupan yang minimal “empat sehat lima sempurna”. Jenis pekerjaan dimaksud antara lain adalah seperti dalam tabel berikut.

Tabel 1. Beragam Jenis Usaha Serabutan di Desa

No	Jenis Pekerjaan	Sifat Pekerjaan
1	Pencari kayu bakar di hutan terdekat	Sambilan
2	Pencari ikan di kali, rawa-rawa, dan sawah rancak	Pokok dan sambilan
3	Pencari daun pisang	Sambilan dan serabutan
4	Pemulung	Pokok
5	Pencari kayu bakar dari “bonggol” kayu yang habis ditebang	Sambilan dan serabutan
6	Pedagang mainan anak-anak keliling	Pokok
7	Pedagang jajanan anak keliling	Pokok
8	Pedagang jajanan anak di kawasan sekolah	Pokok
9	Pedagang jajanan anak musiman	Sambilan dan serabutan
10	Pedagang bakso keliling	Pokok
11	Pedagang sayuran matang keliling	Pokok
12	Pedagang sayuran keliling (pedagang gorengan)	Sambilan dan serabutan
13	Pencari sayuran yang tumbuh liar di sawah	Sambilan

14	Penderes nira kelapa	Pokok
15	Pedagang bubur keliling	Pokok
16	Pedagang “cimol” keliling	Pokok
17	Buruh tani	Serabutan
18	Buruh serabutan	Serabutan
19	Penarik becak	Pokok
20	Penggarap sawah atau ladang milik orang lain	Pokok
21	Beternak ayam kampung dan itik secara tradisional	Serabutan dan sambilan
22	Pemancing ikan di rawa-rawa	Serabutan dan sambilan
23	Pengojek (jasa angkutan sepeda motor)	Pokok dan serabutan
24	Pemijat (juru pijat atau tukang pijat)	Pokok
25	Pencari keroto (sejenis serangga muda untuk pakan burung)	Pokok dan serabutan
26	Dukun	Pokok
27	Dukun pengobatan alternatif	Pokok dan sambilan
28	Pembuat “pipiti” (sejenis wadah bertutup dari anyaman bambu)	Sambilan
29	Jasa penjualan bambu	Pokok dan serabutan
30	Penjaja barang kreditan milik orang lain	Serabutan dan pokok
31	Pembuat bata dari tanah liat	Sambilan
32	Penyadap getah karet	Sambilan dan serabutan
33	Pedagang “pecel” keliling	Pokok
34	Warung nasi mangkal	Pokok
35	Derep atau mbawon (mendapatkan upah dari membantu memanen padi milik tetangga)	Serabutan dan Musiman
36	Penyeblok (nyeblok, ceblok)	Serabutan dan pokok
37	Pemelihara ternak milik orang lain	Sambilan dan serabutan
38	Penjual “jasa” transaksi penjualan (calo)	Serabutan dan sambilan
39	Pembuat obat dari cacing tanah	Sambilan dan serabutan
40	Pembuat saleh pisang (sale)	Sambilan dan serabutan
41	Pembuat keripik pisang	Sambilan dan pesanan
42	Pembuat keripik singkong	Sambilan dan pesanan
43	Pembuat keripik gadung	Sambilan
44	Pembuat cetil	Serabutan dan pokok
45	Pengelola arisan	Sambilan dan serabutan
46	Pedagang gorengan dititipkan ke warung	Sambilan
47	Pedagang ikan sawah keliling	Sambilan dan pokok
48	Pedagang jajan pasar keliling	Pokok dan sambilan
49	Pedagang es keliling	Pokok
50	Pedagang cilok dan cimol keliling	Pokok
51	Pembuat sapu lidi	Sambilan
52	Penggali sumur	Sambilan dan serabutan
53	Pencari bahan sayuran yang tumbuh liar di rancak dan rawa-rawa terdekat	Serabutan
54	Tukang Gigi	Pokok
55	Pembuat kue donat untuk dijual di pasar	Serabutan dan pesanan
56	Pembuat telur asin	Pokok
57	Pembuat aneka kue basah	Sambilan
58	Pembuat aneka kue kering	Sambilan dan pesanan

5. Model Usaha Berbasis Membaca Dengan Pola Pendampingan

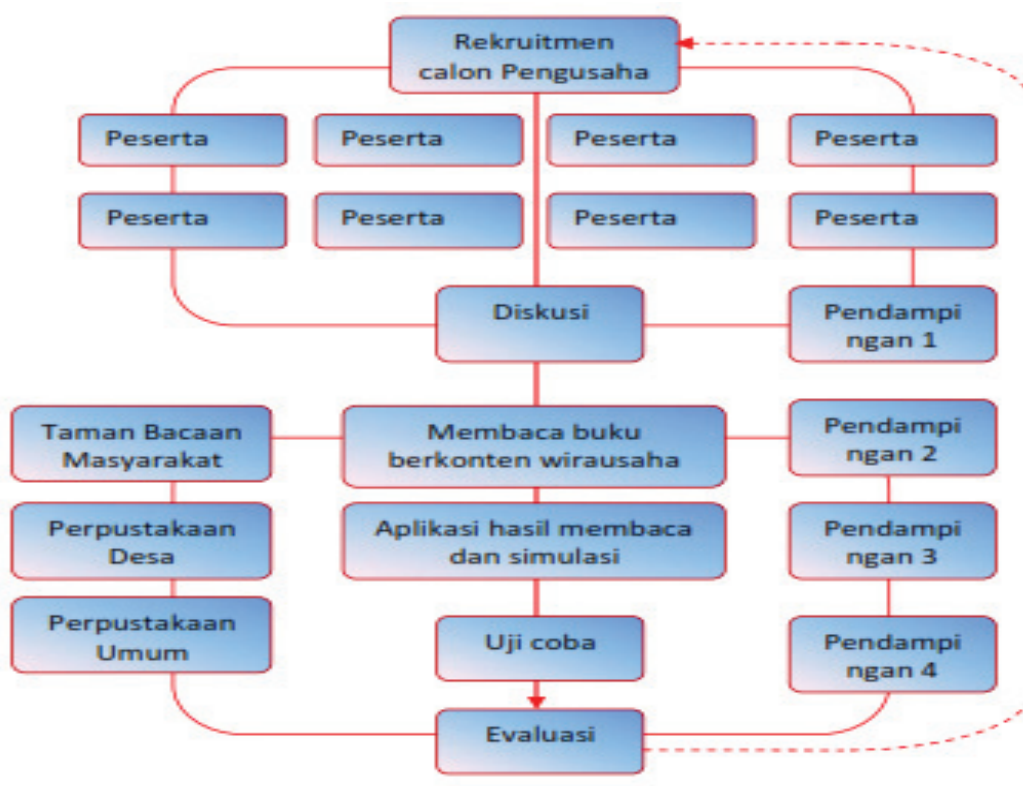
Beberapa model bisa disusun untuk memudahkan uji coba hasil membaca untuk tujuan usaha di kalangan penduduk miskin pedesaan. Model-model dimaksud adalah model pengembangan usaha berbasis membaca

dan memanfaatkan layanan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat. Model uji coba kelompok usaha berbasis membaca untuk jenis usaha tertentu seperti model produksi dan distribusi telur asin di pedesaan.

Model pengembangan usaha pembuatan aneka kue kering; model usaha produksi pembuatan aneka kue basah; dan sejenisnya. Tulisan ini lebih fokus pada perumusan model pengembangan usaha berbasis pemanfaatan sumber-sumber informasi kepustakaan yang tersedia di desa,

namun sudah diintegrasikan dengan sistem layanan membaca secara pendampingan (lihat Gambar 1).

Berikut adalah model pengembangan usaha berbasis membaca sumber pustaka.



Gambar 1. Model Pengembangan Usaha Berbasis Membaca Pustaka

Gambar 1 menjelaskan secara visual tentang aspek proses kegiatan model pengembangan usaha berbasis membaca sumber-sumber informasi yang disediakan oleh layanan perpustakaan desa dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang ada di desa. Diawali dengan adanya langkah pendaftaran calon peserta, kemudian lakukan diskusi dengan mereka yang sudah didaftar. Pada tahapan ini sudah dimulai kegiatan pendampingan oleh tim penelitian dari perguruan tinggi. Selanjutnya, tim pendampingan mengajak diskusi dengan para peserta mengenai topik apa saja yang menjadi perhatian mereka, terutama yang terkait dengan teknik berwirausaha yang bisa dilakukan di desa.

Setiap kegiatan diskusi dengan para peserta tim pendampingan selalu memberikan gambaran. Penjelasan

dan motivasi agar kesadaran mereka akan kehadiran perpustakaan desa dan sumber-sumber informasi kepustakaan lain yang ada di desa. Adapun langkah-langkah teknis terkait pendampingan dimaksud adalah sebagai berikut :

- (1) Pendampingan pertama. Pendampingan ini dilakukan untuk pertama kali dengan sejumlah anggota masyarakat yang sudah didaftar, terutama dari kalangan kelompok komunitas atau kelompok sosial tertentu, misalnya kelompok anak dan remaja putus sekolah, ibu rumah tangga, buruh tani serabutan, usaha berbasis potensi desa, dan lainnya yang ada di desa, termasuk para pamong desa dan pemuka masyarakat yang ada di desa.
- (2) Pendampingan kedua. Pendampingan ini dilakukan

dengan berdiskusi dan penjelasan mengenai kehadiran perpustakaan desa yang salah satu kelompok kontennya berorientasi pada aspek kewirausahaan. Mereka dilatih membaca bahan bacaan atau sejumlah buku dan mencoba mengaplikasikannya sesuai dengan isi bacaannya. Para peserta kelompok usaha ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan anggota masyarakat setempat.

(3) Pendampingan ketiga. Pada pendampingan ketiga para peserta sudah mulai didampingi untuk melakukan praktik mengaplikasikan hasil dari membaca pustaka berkonten kewirausahaan. Kegiatan simulasi usaha dilakukan pada tahap ini, termasuk di dalamnya dicoba dijelaskan mengenai analisa BEP (*Break Even Point*) atau analisis titik impas dalam berwirausaha. Semua kegiatan pendampingan usaha dan membaca seperti ini selalu melibatkan peran perpustakaan desa, perpustakaan umum, dan/atau taman bacaan masyarakat yang ada di desa.

(4) Pendampingan keempat. Pada pendampingan keempat hampir sama dengan kegiatan pada tahap-tahap sebelumnya, namun di sini sudah lebih langsung dalam mengaplikasikan hasil membacanya. Para peserta sudah langsung praktik dalam berusaha sesuai dengan jenis usaha pilihannya.

(5) Akhirnya, dilakukan kegiatan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang ada, mulai dari tahap pendampingan pertama sampai tahap pendampingan keempat. Kegiatan evaluasi ini gunanya untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program kegiatan yang dilakukan oleh tim penelitian dan juga sekaligus untuk mengukur sejauh mana kemampuan praktik peserta dalam menoba mengaplikasikan hasil membaca untuk tujuan usaha sesuai jenis usaha pilihannya.

6. Sinergi Layanan Perpustakaan Berbasis Pendampingan

Sinergitas hubungan fungsional antar berbagai unsur yang terkait dalam program pemberdayaan penduduk miskin pedesaan menjadi pokok praktik dalam kegiatan penelitian ini. Ada unsur pemerintah setempat, perguruan tinggi, pusat layanan informasi publik seperti perpustakaan dan taman bacaan masyarakat dan unsur lainnya baik negeri dan swasta.

Di tingkat layanan implementatif berorientasi kewirausahaan yang dilakukan oleh lembaga layanan informasi seperti perpustakaan umum, perpustakaan

desa, dan taman bacaan masyarakat yang ada di desa, mereka perlu didorong dan difasilitasi agar secara aktif berperan sebagai mediator dan sekaligus fasilitator pembangunan di desa. Salah satu bentuk kegiatannya adalah melakukan uji coba layanan kelompok pengguna berbasis mengaplikasikan hasil membaca.

Jika sekelompok orang menggunakan dan membaca buku berkonten teknik memelihara ayam kampung, kelompok pembaca tersebut perlu didorong agar bersedia melaksanakannya sesuai dengan yang ada dalam bacaan tadi. Kelompok pembaca tadi perlu didorong dan diberi fasilitas berupa bantuan modal sesuai dengan kebutuhan minimal untuk mengaplikasikan uji coba usaha dimaksud. Pada saat kegiatan uji coba usaha dimaksud, tim pendampingan dari perguruan tinggi bersiap secara terstruktur dan terprogram melakukan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan pada setiap langkah kegiatan usaha yang memerlukannya. Dalam jangka panjang, kegiatan seperti ini akan menular ke desa-desa lain yang berkarakter mirip, yakni masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya bekerja secara serabutan. Dengan pola pendampingan seperti itu, kelompok-kelompok usaha berbasis membaca sebagai bagian dari hasil kerja sama sinergitas antara perpustakaan, taman bacaan masyarakat, pemerintah setempat, dan perguruan tinggi dapat membuahkan hasil yang diharapkan.

Subjek pembangunan pedesaan adalah penduduk yang sebagian besar termasuk kategori prasejahtera atau miskin. Penduduk miskin bukan objek pembangunan, tetapi subjek pembangunan. Program-program pembangunan yang bertujuan mengentaskan mereka keluar dari kemiskinan harus secara langsung melibatkan mereka. Dalam setiap kegiatan, mereka harus ada di dalamnya. Namun, tentu saja harus terencana, terstruktur, dan terdampingi. Pengertian terdampingi dalam konteks tulisan ini adalah adanya sinergi hubungan yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait ketika ada kegiatan yang bertujuan memberdayakan penduduk miskin di pedesaan. Pihak terkait dimaksud dan fungsinya masing-masing meliputi (i) pemerintah pusat, (ii) Pemerintah setempat, (iii) bantuan modal, (iv) perguruan tinggi, (v) layanan pustaka kewirausahaan, (vi) penyuluh lapangan, (vii) pilihan wirausaha, (viii) kelompok usaha, (ix) pendampingan, dan (x) monitoring dan evaluasi.

a. Pemerintah pusat

Pemerintah pusat merencanakan dan membuat peraturan dan kebijakan yang sifatnya menyeluruh terhadap bentuk-bentuk program kegiatan yang bertujuan memberdayakan penduduk, termasuk penduduk miskin pedesaan. Bentuk-bentuk kegiatan ini harus disinergikan dengan kegiatan yang dirancang dan dilakukan oleh pemerintah setempat dan pihak lain yang menangani masalah ini. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan ini adalah penyediaan modal usaha yang diperuntukkan bagi rakyat miskin secara langsung yang pelaksanaannya melibatkan pihak terkait seperti pemerintah setempat, tenaga penyuluh lapangan, dan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai konsultan dan pelaksana pendampingan.

b. Pemerintah setempat

Pemerintah setempat berfungsi sebagai penggerak dan motivator kegiatan agar rakyat berkategori miskin di pedesaan bersedia melakukan kegiatan usaha secara berkelompok dan menyediakan fasilitas bahan rujukan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Penyediaan perpustakaan desa dan melakukan pencerdasan kepada masyarakat melalui layanan proaktif perpustakaan desa adalah tanggung jawab pemerintah desa. Selain itu, pemerintah setempat juga berkewajiban untuk secara proaktif mendampingi kelompok usaha orang miskin di desanya agar bisa keluar dari kondisinya selama ini. Salah satu caranya adalah dengan mengusahakan agar rakyat miskin di desa diikutsertakan dalam BPJS kesehatan, BPJS Pendidikan, BPJS Kewirausahaan, dan sejenisnya yang bisa diusulkan melalui model kerja sama layanan perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, dan perguruan tinggi.

c. Bantuan modal

Modal bagi kegiatan kelompok usaha berbasis membaca yang dilakukan oleh rakyat miskin di pedesaan itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah setempat, pihak swasta, dan perguruan tinggi untuk mengusahakan penyediaannya. Dalam praktik, kebutuhan modal untuk usaha bagi penduduk miskin di pedesaan sebenarnya tidak perlu besar bahkan dalam tingkatan tertentu tidak lebih dari satu juta rupiah pun cukup untuk menjalankan jenis usaha pilihan mereka. Buktinya, selama ini mereka bisa hidup tanpa bantuan apapun dari pihak manapun, namun mereka bisa bertahan hingga hari ini, dan mungkin sampai waktu yang akan datang jika tidak ada upaya untuk mengubah kondisi tersebut.

d. Perguruan tinggi

Perguruan tinggi bertugas sebagai konsultan dan pelaksana tim pendampingan kegiatan usaha yang dilakukan oleh penduduk kelompok miskin pedesaan. Melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan sejauh ini, perguruan tinggi bisa berperan langsung terhadap program-program yang bertujuan memberdayakan penduduk miskin agar lebih cepat keluar dari kondisinya sekarang. Tim perguruan tinggi melalui program-program yang terjadwal dan berkesinambungan, melatih dan mendampingi penduduk miskin dalam berbagai jenis usaha yang sesuai dengan pilihan mereka.

e. Layanan pustaka kewirausahaan

Dari sisi perpustakaan, terutama perpustakaan umum, perpustakaan desa, dan taman bacaan masyarakat yang ada di desa, layanan pustaka kewirausahaan bisa dilakukan sistem layanan implementatif berorientasi kewirausahaan. Mereka berkewajiban menyediakan beragam bahan rujukan, bahan bacaan, dan pustaka lainnya yang berkonten kewirausahaan yang banyak dilakukan di desa. Dengan pola layanan seperti ini maka jenis-jenis usaha yang bisa dikembangkan di desa menjadi lebih bervariasi karena mendapatkan informasi dan pencerahan dari layanan pustaka kewirausahaan yang dilakukan oleh perpustakaan dan taman bacaan masyarakat ini. Pada tahap awal, pihak perguruan tinggi bisa menginisiasi penyelenggaraan sistem layanan pendampingan usaha berbasis membaca pustaka kewirausahaan yang disediakan oleh perpustakaan dan taman bacaan masyarakat, namun pada tahapan selanjutnya jika sudah terjadi kegiatan, perguruan tinggi harus melakukan pendampingan terhadap kegiatan jenis kegiatan ini sampai berhasil. Suatu saat kelak jika sistem layanan ini sudah berjalan dan sudah dikenal oleh masyarakat pedesaan dan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, jenis-jenis penghidupan penduduknya lebih bervariasi dan diharapkan angka kemiskinan di pedesaan bisa dikurangi.

f. Penyuluh lapangan:

Tenaga ini biasanya dimiliki oleh pemerintah setempat. Mereka bergerak di berbagai bidang keahlian seperti pertanian, kewirausahaan, pendidikan, agama, sosial, hukum, kesehatan, dan sebagainya. Khusus untuk kegiatan pemberdayaan penduduk miskin di pedesaan, yang diperlukan saat ini adalah tenaga penyuluh lapangan

yang secara intens melakukan upaya pencerahan, motivasi, dan memperkenalkan berbagai jenis usaha yang bisa dikembangkan di desa melalui kegiatan-kegiatan berbasis usaha kelompok yang bersinergi dengan kegiatan lain yang sudah disebutkan di atas.

g. Pilihan wirausaha

Tim inisiator bisa dari perguruan tinggi, penyuluh lapangan, perpustakaan, swasta, atau inisiatif sendiri dari sekelompok anggota masyarakat di desa yang jumlahnya antara 5--10 orang dan memilih bidang wirausaha yang mereka minati dan bisa dikembangkan di desa. Misalnya, mereka bisa memilih jenis wirausaha pembuatan telur asin, pembuatan kue brownis kukus atau panggang, pembuatan kue sistik, lidah kucing, dan lain-lain. Bisa juga mereka memilih jenis usaha lain yang ada dalam bahan bacaan yang dilayankan oleh perpustakaan dan taman bacaan masyarakat, misalnya jenis usaha budidaya cacing tanah untuk obat, budidaya lele dumbo, budi daya ayam seni adu, cara memelihara ayam petelor, dan lain-lain. Semua jenis usaha yang dipilih oleh mereka berdasarkan hasil membaca yang dilayankan oleh perpustakaan dan taman bacaan masyarakat yang ada di desa

h. Kelompok usaha

Sejumlah orang secara berkelompok yang anggotanya berjumlah antara 3--10 orang. Mereka adalah kelompok yang sudah memilih jenis usaha yang akan dicobakembangkan di desa. Kelompok ini akan dilatih dan didampingi oleh tim dari perguruan tinggi melalui program PKM dan penelitian tindakan (*implementatif*). Mereka juga akan diberi modal sesuai dengan jenis usahanya. Modal ini bisa diperoleh melalui bantuan modal bergulir dari pemerintah, modal dari pihak swasta, atau modal sebagai bagian dari bantuan pihak pengusul kegiatan penelitian dan PKM dari perguruan tinggi yang dimasukkan sebagai biaya bahan habis pakai atau biaya lokakarya dan transport lokal peserta. Modal untuk tiap kelompok tidak perlu besar, tetapi cukup untuk melakukan uji coba usaha sesuai dengan jenis usaha pilihannya. Menurut pengalaman hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (IBM) yang dilakukan oleh Yusup, dkk. (2014), besaran modal awal untuk memulai suatu usaha tidak melebihi empat juta rupiah per kelompok.

i. Pendampingan

Pendampingan dilakukan oleh tim pengusul kegiatan dari perguruan tinggi melalui program PKM dan penelitian tindakan (*implementatif*). Fungsi tim pendampingan ini adalah untuk mengawal, melatih, membina, dan mengevaluasi aspek-aspek keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan kelompok usaha berbasis membaca ini. Ke depan teknik pendampingan ini bisa dilakukan oleh tim ahli yang difasilitasi oleh sistem layanan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat berbasis layanan *implementatif* kewirausahaan atau dikenal juga dengan sebutan layanan *pustaka kewirausahaan*.

j. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim kegiatan penelitian berkelanjutan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang juga berkelanjutan dari perguruan tinggi. Untuk kegiatan yang diusulkan ini, kegiatan pendampingan dilakukan oleh tim pengusul kegiatan yang diinisiasi dari Universitas Padjadjaran. Fungsi dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk memantau, melatih, membina, dan memberikan fasilitas konsultasi untuk aspek-aspek keberlanjutan kelompok usaha berbasis membaca sumber-sumber informasi penghidupan di desa tempat penelitian ini dilakukan.

7. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menghasilkan temuan pokok berupa model pengembangan usaha yang bisa diaplikasikan pada masyarakat miskin di pedesaan, yakni model pengembangan usaha serabutan berbasis memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan cetak dan *online* yang berkonten kewirausahaan, dengan fokus pada perumusan model pengembangan usaha serabutan yang bisa dilakukan oleh sejumlah anggota masyarakat secara kelompok.

Saran pertama bertujuan memberdayakan rakyat miskin di pedesaan dan melibatkan orang-orang miskin secara langsung. Saran kedua adalah di setiap wilayah pedesaan terdapat kegiatan yang dibangun atas dasar upaya untuk memberdayakan penduduk miskin di pedesaan yang berbasis potensi desa, tetapi perlu memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, baik cetak maupun *online*.

Daftar Pustaka

- Amirudin, 2010. "Makna Miskin bagi Penduduk miskin di Jawa Tengah (Analisis Mitos Kemiskinan di Kotamadya Dati II Semarang)". [<http://eprints.undip.ac.id/21985/>]. Diakses tanggal Januari 2013.
- Badruddin, Syamsiah. 2009. "Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Indonesia Pra dan Pasca Runtuhnya Orde Baru". [<http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/04/23/49/>]. Diakses tanggal 2 Desember 2013.
- Djohani, Rianingsih 2003. *Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokratisasi Komunitas: Reposisi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Program Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Studio Driya Media.
- Rusastra, I. Wayan dan Togar A. Napitupulu. 2010. *Karakteristik Wilayah dan Keluarga Miskin di Pedesaan: Basis Perumusan Intervensi Kebijakan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dan UNESCAP-CAPSA.
- Savolainen, R. 2012. "Conceptualizing Information Need in Context: Information Research, 17(4) Paper 534". [<http://InformationR.net/ir/17-4/paper534.html>]. Diakses tanggal 12 Mei 2013.
- Yusup, Pawit M. 2012. Perilaku Pencarian Informasi Penghidupan pada Penduduk Miskin Pedesaan: Studi Fenomenologi mengenai Makna Miskin bagi Penduduk Miskin dan Perilakunya dalam Menemukan Informasi Penghidupan di Pedesaan Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Yusup, Pawit M., 2013. Perilaku Pencarian Informasi Penghidupan pada Penduduk Miskin Pedesaan. Bandung: LPPM Universitas Padjadjaran,
- Yusup, Pawit M. 2013. "Makna Diri Penduduk Miskin Pedesaan (Rural Poor Sense of Self). Dalam Indonesian Journal of DIALECTICS - IJAD. Volume 3 Nomor 2. Agustus 2013, hal 85--89. ISSN 2089--9211.
- Yusup, Pawit M. dan Neneng Komariah. 2012. Dimensi Pencarian dan Penggunaan Informasi Kesehatan pada Keluarga Prasejahtera di Kabupaten Bandung: Studi Tentang Pemetaan terhadap Kebutuhan, Pencarian, dan Penggunaan Informasi Kesehatan pada Keluarga Prasejahtera di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Bandung: LP3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.
- Yusup, Pawit M, dkk. 2013. "Memetakan Lingkup Informasi Penghidupan Orang Miskin Pedesaan". Dalam Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan-JKIP, Volume 1 Nomor 1, Juni 2013. ISSN: 2303-2677. Hal. 21--28.
- Zhao, Y., Zhang, R. and Klein, K.K. 2009. "Perceived Information Needs and Availability: Results of A Survey of Small Dairy Farmers in Inner Mongolia. Information Research, 14(3) paper 411". [<http://InformationR.net/ir/14-3/paper411.html>]. Diakses tanggal 20 April 2013.